



Efektivitas Penerapan Absensi Online (*Face Detector*) Untuk Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali

Debby Margareth Hutasoit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Putu Eka Purnamaningsih

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Komang Adi Sastra Wijaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Korespondensi penulis: debbymargareth2000@gmail.com

Abstract. *The aim of application online attendance (Face Detector) at the BKPSDM Bali Province is to increase the discipline of employees, both PNS and non-PNS employees. However, in its implementation, there are still some problems, such as application that still often crashes, employee absences that are often rejected, and employee abilities that are not evenly distributed. This study uses indicators of effectiveness based on Duncan in Kharisma (2017) which consist of three indicators of goal achievement, integration, and adaptation. The results of the study show the effectiveness of implementing online attendance (Face Detector) at the BKPSDM Bali Province..*

Keywords: *BKPSDM Bali Province, Effectiveness and Online Attendance (Face Detector)*

Abstrak. Tujuan dari aplikasi absensi online (Face Detector) di BKPSDM Provinsi Bali adalah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, baik pegawai PNS maupun pegawai non PNS. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, seperti aplikasi yang masih sering error, absensi pegawai yang sering ditolak, dan kemampuan pegawai yang kurang merata. Penelitian ini menggunakan indikator Efektivitas berdasarkan Duncan dalam Kharisma (2017) yang terdiri dari tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan Efektifitas penerapan absensi online (Face Detector) di BKPSDM Provinsi Bali.

Kata kunci: *BKPSDM Provinsi Bali, Efektifitas dan Absensi Online (Face Detector)*

LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan jaman serta perkembangan teknologi yang semakin canggih, memunculkan berbagai fasilitas elektronik berbasis internet untuk menunjang hampir seluruh kegiatan dalam bermasyarakat. Pengguna internet di Indonesia pun selalu mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Berdasarkan *We Are Social*, melaporkan terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022 (Databoks.com, 2022). Melalui perkembangan internet tersebut, pemerintah melakukan beberapa inovasi dengan memanfaatkan internet

Received Mei 22, 2023; Revised Juni 30, 2023; Accepted Juli 12, 2023

* Debby Margareth Hutasoit, debbymargareth2000@gmail.com

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terlihat dari banyaknya aplikasi-aplikasi layanan online yang telah diberlakukan pemerintah untuk menunjang pelayanan di Indonesia. Tidak hanya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, saat ini teknologi internet juga telah digunakan dalam hal birokrasi yakni melalui sistem absensi online.

Sebelum menggunakan sistem absensi berbasis teknologi internet, sistem absensi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang diawali dengan absensi manual yakni secara lisan dan tertulis. Absensi lisan dilakukan melalui pengumpulan seluruh pegawai dan pengabsen akan memanggil satu persatu pegawai untuk mengetahui apakah pegawai tersebut hadir atau tidak. Setelah absensi lisan, kemudian beralih menggunakan absensi tertulis dengan media kertas. Pegawai akan menulis nama maupun tanda tangan pada lembar absensi tertulis untuk mengonfirmasi bahwa pegawai tersebut telah hadir. Dengan sistem absensi tertulis ini, terdapat arsip dengan media kertas yang memudahkan untuk melihat tingkat kehadiran pegawai (Febriyanto dalam Septiah, 2022).

Kedua metode absensi manual tersebut dinilai kurang efektif karena saat penerapannya sering ditemukan tindak manipulasi dan sistem titip absensi. Pengisian absensi dengan metode lisan dan tertulis sering kali disalahgunakan oleh sebagian pegawai agar dapat memenuhi catatan kehadiran yang baik. Sistem absensi manual tidak mencantumkan waktu kedatangan pegawai dan kepulangan sehingga pegawai dapat mengisi absen pada hari lain ataupun menitipkan absen pada pegawai yang menyebabkan atasan kesulitan dalam memberlakukan sanksi. Selain itu, absensi lisan dan tertulis mempunyai proses pendataan yang sedikit rumit dikarenakan harus membuat rekapitulasi serta laporan dengan cara manual, sehingga berpotensi terjadinya kekeliruan dalam proses rekapitulasi akhir absensi. Kehadiran pegawai yang dicatat dalam absensi online akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menggunakan absensi manual yakni absensi lisan dan tulisan. Hal ini dikarenakan absensi online merupakan alat berbasis teknologi yang telah otomatis berisikan data pegawai dalam sebuah organisasi sehingga secara otomatis pula dapat menginput keterangan kehadiran serta kepulangan pegawai tanpa adanya rekayasa. Selain itu, dapat pula menampilkan keterangan seperti waktu kehadiran, waktu kepulangan, sakit, izin, alpa, dan cuti pegawai (Parawu, 2020).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali telah menerapkan sistem absensi online (*Face Detector*) untuk mencatat kehadiran pegawai. Peraturan terkait penggunaan absensi online tersebut tertulis pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Absensi *Face Detector* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi

Bali merupakan unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi dalam bidang kepegawaian yang berperan strategis dalam memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai profil yang dibutuhkan guna mencapai visi serta misi Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai penyedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sudah sebaiknya pula para pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali memiliki tingkat disiplin yang baik terutama dalam hal kehadiran. Sehingga dapat menjadi panutan bagi instansi lain.

Dalam penerapan absensi Face Detector di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali khususnya bidang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai pihak yang memfasilitasi pembuatan aplikasi *Face Detector* yang kemudian digunakan oleh seluruh Badan dan Dinas Publik Pemerintah Provinsi Bali.

Setiap pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali wajib mengunduh aplikasi absensi online di ponsel masing-masing. Para pegawai wajib melakukan absensi sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan yakni saat masuk kantor pukul 06.00 WITA dan saat pulang kantor pukul 15.30 WITA. Para pegawai melakukan absensi dengan berfoto swafoto melalui ponsel masing-masing di lokasi yang telah ditentukan yakni maksimal berjarak 100 meter dari kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Apabila pegawai terlambat melakukan absensi maupun melakukan absensi mendahului jam pulang maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada yakni pemotongan presentase Tujangan Perbaikan Penghasilan Pegawai dihitung berdasarkan jam keterlambatan maupun jam pulang mendahului pegawai.

Namun sejak diterapkannya absensi online (*Face Detector*) ini, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait penggunaan absensi online (*Face Detector*) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, masalah yang ada antara lain pegawai yang merasa kesulitan saat menggunakan aplikasi ini karena aplikasi sering mengalami *error* terutama saat absensi kedatangan. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang mengakses aplikasi secara bersamaan sehingga menyebabkan aplikasi *error*. Akibatnya, beberapa pegawai mengalami keterlambatan absensi. Permasalahan selanjutnya antara lain foto swafoto pegawai dan lokasi yang sering ditolak aplikasi padahal pegawai telah melakukan swafoto dengan benar serta telah berada di lokasi sesuai dengan yang ditentukan yakni maksimal berjarak 100 meter

dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali. Permasalahan selanjutnya yakni masih ditemukannya beberapa pegawai yang kurang mampu dalam melakukan absensi menggunakan absensi online (*Face Detector*) sehingga pegawai merasa kesulitan saat hendak melakukan absensi. Penggunaan absensi online (*Face Detector*) yang diharapkan lebih efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai pada realisasinya masih menemukan beberapa permasalahan yang terjadi. Berkaca melalui pemaparan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan absensi online dengan menetapkan judul **“Efektivitas Penerapan Absensi Online (*Face Detector*) Untuk Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali”**.

KAJIAN TEORITIS

Efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui efektivitas penerapan absensi online (*Face Detector*) di BKPSDM Provinsi Bali maka digunakan teori efektivitas berdasarkan Duncan dalam Kharisma (2017) yang memiliki 3 indikator efektivitas yaitu indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang digunakan penulis yakni data primer dan sekunder. Kemudian data dikumpulkan penulis melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi (Sugiyono, 2021). Data kemudian disajikan dengan cara formal dan informal. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Peneliti memilih 5 informan yakni Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pegawai Unit Substansi Disiplin, Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, dan Pegawai SPBE Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali merupakan sebuah unit organisasi yang menjalankan tugas dalam bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali

memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki profil yang diperlukan untuk proses mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali semulanya merupakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali yang kemudian mengubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali sejak tahun 2021.

Analisis Hasil Temuan

a. Indikator Pencapaian Tujuan

Tujuan dari penerapan absensi online (Face Detector) di BKPSDM Provinsi Bali antara lain untuk meningkatkan disiplin pegawai terutama dalam hal ketepatan waktu kehadiran. Selain meningkatkan disiplin pegawai, penerapan absensi online ini juga dapat menghilangkan tindak kecurangan pegawai saat melakukan absensi dikarenakan absensi online ini merupakan absensi yang menggunakan aplikasi berbasis internet sehingga data yang dihasilkan adalah data secara nyata (realtime) maka tidak dapat dimanipulasi

Pada indikator pencapaian tujuan yakni terdapat 2 aspek yakni aspek jangka waktu pelaksanaan program dan aspek sasaran tujuan yang menjadi target kongkrit dari sebuah program. Pertama, aspek jangka waktu pelaksanaan, absensi online di BKPSDM Provinsi Bali difasilitasi oleh SPBE Diskominfos Provinsi Bali dan telah dibuat sejak tahun 2020. Kemudian aplikasi ini dapat digunakan pada tahun 2021 oleh PNS dan 2023 oleh pegawai non PNS. Hingga saat ini aplikasi absensi online (Face Detector) masih terus mengalami pengembangan dan pembaharuan sehingga belum dapat dipastikan lama waktu yang dibutuhkan hingga menghasilkan aplikasi yang sesempurna mungkin. Pengembangan akan terus dilakukan untuk memastikan agar aplikasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya kendala. Fitur-fitur dalam aplikasi juga senantiasa memerlukan pembenahan baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan menyesuaikan kondisi di lapangan serta mengikuti jaman yang terus berkembang.

Pada aspek kedua yakni sasaran tujuan yang menjadi target kongkrit dalam hal ini diartikan sebagai objek yang menjadi tujuan dari pelaksanaan sebuah program. Pada penerapan absensi online (Face Detector), objek dari penerapan program tersebut antara lain seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Bali termasuk PNS dan non PNS. Di BKPSDM Provinsi Bali penerapan absensi online (Face Detector) juga ditujukan untuk seluruh pegawai baik PNS dan non PNS sehingga seluruh pegawai di BKPSDM Provinsi Bali dapat sama-sama meningkatkan disiplin melalui penerapan absensi online ini. Adapun

tingkat kedisiplinan pegawai di BKPSDM Provinsi Bali dapat ditinjau melalui data dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Data Persentase Kehadiran Pegawai PNS BKPSDM Provinsi Bali

Bulan	Akumulasi Persentase Kehadiran Pegawai	
	2021	2022
Januari	100%	99,93%
Februari	99,60%	99,81%
Maret	97,63%	100%
April	97,16%	100%
Mei	96,86%	98,77%
Juni	98,47%	99,09%
Juli	98,07%	99,13%
Agustus	99,19%	97,52%
September	95,01%	98,21%
Oktober	98,77%	96,87%
November	100%	98,45%
Desember	100%	98,22%
Rata-rata	98,39%	98,83%

Sumber : Arsip BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2021-2022

Tabel 4. 2 Data Persentase Kehadiran Pegawai Non PNS BKPSDM Provinsi Bali

Bulan	Akumulasi Persentase Kehadiran Pegawai
	Tahun 2023
Januari	93,34%
Februari	92,29%
Maret	88,72%
April	89,79%
Rata-rata	91,03%

Sumber : Arsip BKPSDM Provinsi Bali Tahun 2021-2022

Persentase kehadiran pegawai PNS di BKPSDM Provinsi Bali berada di angka 98,39% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 98,83%. Tidak sedikit pula pegawai PNS yang memiliki persentase kehadiran individu 100% pada setiap bulannya. Sementara rata-rata persentase kehadiran pegawai non PNS berada di bawah pegawai PNS yakni per April 2023 hanya sebesar 91,03%. Banyak pula pegawai non PNS yang persentase absensi individunya masih berada di bawah 60%. Hal ini disebabkan masih banyak pegawai non PNS yang belum terbiasa menggunakan absensi online (Face Detector) sehingga masih kesulitan saat melakukan absensi. Meskipun demikian, pada indikator pencapaian tujuan telah berjalan optimal baik dari aspek jangka waktu pelaksanaan dan aspek sasaran tujuan yang menjadi target kongkrit sebuah program.

b. Indikator Integrasi

Indikator integrasi merupakan indikator yang mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi serta komunikasi ataupun kerjasama dengan berbagai organisasi maupun pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan suatu program. Integrasi terdiri dari aspek proses sosialisasi dan pengawasan. Pertama, pada aspek proses sosialisasi, sosialisasi awal dilaksanakan sebanyak dua kali yakni sosialisasi dari SPBE Diskominfo Provinsi Bali kepada BKPSDM Provinsi Bali dan sosialisasi internal di BKPSDM Provinsi Bali. Kedua sosialisasi tersebut sama-sama menggunakan metode online yakni memanfaatkan Zoom Meeting dikarenakan saat sosialisasi berlangsung, pandemi Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Hingga saat ini, sosialisasi masih rutin dilakukan terutama saat terdapat perubahan maupun update pada aplikasi. Sosialisasi akan disampaikan kepada admin kemudian admin akan menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai. Para pegawai di BKPSDM Provinsi Bali juga memiliki grup khusus pegawai di aplikasi Whatsapp untuk memudahkan koordinasi. Apabila terdapat informasi baru mengenai aplikasi absensi online (Face Detector) maka akan disampaikan melalui grup Whatsapp tersebut oleh admin sehingga seluruh pegawai dapat dengan mudah mengetahui informasi terbaru mengenai aplikasi absensi online (Face Detector).

Kedua, aspek pengawasan program. Pada aspek pengawasan program, pengawasan penggunaan absensi online (Face Detector) di BKPSDM Provinsi Bali dilakukan dengan bekerja sama bersama SPBE Diskominfo Provinsi Bali. Apabila pegawai di BKPSDM Provinsi Bali mengalami kendala terkait sistem aplikasi maka akan melaporkan masalah tersebut pada SPBE Diskominfo Provinsi Bali. Pegawai akan menginformasikan kendala melalui admin yang kemudian adminlah yang berkoordinasi dengan SPBE Diskominfo Provinsi Bali. Admin juga melakukan pemantauan apabila menemukan pembaharuan pada aplikasi maka admin akan menjelaskan kepada pegawai dan memandu pegawai sehingga pegawai dapat memahami informasi dan tidak mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya apabila masalah yang ditemui saat melakukan pengawasan adalah masalah yang datang dari pegawai maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator integritas diwujudkan sudah efektif pada aspek sosialisasi dan aspek pengawasan.

c. Indikator Adaptasi

Indikator adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyetarakan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun adaptasi terdiri dari dua aspek yakni aspek kemampuan pegawai dan aspek sarana prasarana. Pertama, pada aspek kemampuan pegawai, para pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali khususnya pegawai PNS telah mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan dari absensi manual menjadi absensi online menggunakan aplikasi Face Detector meskipun masih terdapat kendala saat menggunakan aplikasi absensi online (Face Detector). Salah satu kendala yang sering dialami pegawai yakni pada sistem dikarenakan sistem yang 78 masih baru dan belum stabil. Para pegawai yang telah berusia lanjut juga masih mengalami kendala karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Selain itu, pegawai non PNS juga masih merasa kesulitan beradaptasi menggunakan absensi online (Face Detector) karena belum terbiasa dan tidak menguasai penggunaan teknologi khususnya bagi pegawai kebersihan. Karena belum terbiasa, pegawai tersebut sering kali lupa untuk melakukan absensi sehingga persentas kehadiran pegawai masih kurang jika dibandingkan dengan pegawai lain. Adapun pendampingan telah dilakukan oleh pihak BKPSDM Provinsi Bali melalui admin. Admin bertugas untuk mendampingi pegawai saat pegawai kurang paham maupun mendapat masalah saat menggunakan aplikasi Face Detector. Admin akan memberikan penjelasan kepada pegawai yang mengalami kendala sehingga pegawai tersebut dapat kembali menggunakan aplikasi dengan baik. Namun meskipun telah dilakukan pendampingan, nyatanya pegawai non PNS masih tetap kesulitan dan belum mampu beradaptasi dengan baik dalam melakukan absensi dengan menggunakan absensi Face Detector.

Kedua, pada aspek sarana dan prasarana, aplikasi yang digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai ini masih sering mengalami masalah. Seperti error terutama saat kualitas jaringan internet yang kurang stabil. Jaringan internet yang kurang mendukung dapat menyebabkan gangguan saat aplikasi digunakan. Terutama saat melakukan pembaharuan atau update tidak dapat dilakukan apabila kualitas jaringan internet menurun. Meskipun telah tersedia Wi-Fi namun jumlah Wi-Fi yang tersedia masih belum mencukupi untuk dapat digunakan oleh seluruh pegawai BKPSDM Provinsi Bali. Selain itu, aplikasi juga kerap kali mengalami error saat pegawai menggunakan aplikasi secara bersamaan sehingga harus menunggu beberapa saat untuk dapat melakukan absensi. Lokasi dan swafoto pegawai juga sering ditolak aplikasi padahal pegawai telah melakukan absensi sesuai dengan ketentuan. Akibatnya pegawai harus mengulang melakukan absensi

beberapa kali agar dapat diterima oleh aplikasi dan absensi dinyatakan berhasil. Karena hal ini pula beberapa pegawai sering mengalami keterlambatan absensi karena harus menunggu beberapa saat atau mengulang melakukan absensi agar absensi dinyatakan telah berhasil.

Untuk sarana pendukung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali juga telah menyediakan sebuah tablet yang dapat digunakan oleh pegawai yang tidak memiliki ponsel berbasis Android maupun ios. Tablet ini dapat digunakan untuk melakukan absensi karena telah difasilitasi aplikasi Face Detector sehingga pegawai dapat melakukan absensi meskipun tidak memiliki ponsel. Tablet yang disediakan BKPSDM Provinsi Bali ini diletakkan di lobi kantor BKPSDM Provinsi Bali yang dapat dengan mudah digunakan oleh para pegawai untuk melakukan absensi. Tablet ini juga dapat digunakan bukan hanya bagi pegawai yang tidak memiliki ponsel namun dapat juga digunakan untuk pegawai yang mengalami kendala pada ponsel sehingga dapat tetap melakukan absensi.

Berkaitan dengan analisis tersebut, pada indikator adaptasi masih belum berjalan optimal. Ditinjau dari kemampuan pegawai, para pegawai telah mampu menggunakan aplikasi absensi online (Face Detector) meskipun masih terdapat kendala seperti pegawai yang berusia lanjut dan khususnya pegawai non PNS yang masih mengalami kesulitan beradaptasi saat menggunakan aplikasi ini meskipun telah diberlakukan pendampingan oleh admin. Sementara pada aspek sarana dan prasarana BKPSDM Provinsi Bali telah menyediakan tablet khusus untuk pegawai yang tidak memiliki ponsel sehingga dapat melakukan absensi online seperti pegawai lainnya. Namun pada aspek ini dinilai masih belum efektif karena aplikasi yang digunakan saat melakukan absensi sering mengalami error yang dapat menyebabkan pegawai mengalami keterlambatan mengabsen. Kualitas jaringan internet di BKPSDM Provinsi Bali juga kurang stabil yang menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan terutama saat melakukan pembaharuan maupun update.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

1. Aplikasi *Face Detector* yang Canggih Sehingga Tingkat Dapat Dimanipulasi

Absensi Face Detector yang digunakan oleh BKPSDM Provinsi Bali merupakan aplikasi absensi berbasis internet yang secara otomatis dapat merekam absensi pegawai melalui pengenalan wajah. Wajah para pegawai telah tersimpan dalam database aplikasi sehingga pegawai tidak dapat melakukan manipulasi seperti titip absen karena harus

pegawai sendirilah yang melakukan absensi agar sesuai dengan wajah yang terekam sebelumnya. Apabila wajah yang telah tersimpan dalam database pegawai berbeda dengan wajah pegawai saat melakukan absensi maka absensi tidak berhasil.

Lokasi pegawai saat melakukan absensi juga harus sesuai dengan ketentuan yakni maksimal berjarak 100 meter dari BKPSDM Provinsi Bali. Hal ini menyebabkan pegawai harus datang ke kantor untuk melakukan absensi datang dan harus tetap berada di kantor saat melakukan absensi pulang. Sehingga pegawai tidak bisa melakukan absensi di luar lokasi kantor BKPSDM Provinsi Bali. Waktu absensi pegawai juga tercantum secara realtime kapan pegawai melakukan absensi datang dan pulang, Apabila terlambat maka akan terlihat waktu keterlambatan pegawai sehingga dapat dikenakan sanksi. Pegawai juga tidak dapat melakukan absensi mendahului jam pulang kerja karena akan tercantum di aplikasi waktu pegawai melakukan absensi sebelum jam pulang kerja. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi pegawai sehingga tidak terlambat saat melakukan absensi datang dan tidak mendahului absensi pulang.

2. Aplikasi Face Detector yang Canggih Sehingga Tingkat Dapat Dimanipulasi

Aplikasi absensi online (Face Detector) ini merupakan hasil kerja sama antara BKPSDM Provinsi Bali dan SPBE Diskominfo Provinsi Bali. Sejak aplikasi absensi online (Face Detector) ini dibuat oleh SPBE Diskominfo Provinsi Bali, pihak BKPSDM Provinsi Bali selalu melakukan pemantauan terhadap penggunaan absensi online di lingkungan BKPSDM Provinsi Bali. Apabila terdapat masalah terutama mengenai sistem saat menggunakan aplikasi ini maka akan langsung melaporkan hal tersebut kepada SPBE Diskominfo Provinsi Bali. Admin BKPSDM Provinsi Bali akan menghubungi SPBE Diskominfo Provinsi Bali terkait masalah yang terjadi baik melalui surat maupun melalui aplikasi Whatsapp. Selanjutnya jika terdapat pembaharuan pada aplikasi, pihak SPBE Diskominfo Provinsi Bali akan langsung menginformasikan pembaharuan tersebut pada admin BKPSDM Provinsi Bali sehingga dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai BKPSDM Provinsi Bali. SPBE Diskominfo Provinsi Bali akan memberikan informasi se jelas mungkin terkait pembaharuan agar dapat dimengerti oleh admin sehingga admin dapat menjelaskan kepada pegawai apabila pegawai kesulitan saat melakukan pembaharuan pada aplikasi.

3. Sanksi Tegas yang Diberlakukan BKP SDM Provinsi Bali

Bagi pegawai yang tidak melakukan absensi dengan alasan yang jelas, pegawai yang terlambat melakukan absensi datang, dan pegawai yang melakukan absensi pulang sebelum jam pulang kantor akan dikenakan sanksi tegas oleh BKPSDM Provinsi Bali. Terdapat perbedaan mengenai sanksi yang diterapkan baik untuk pegawai PNS dan non PNS. Khusus untuk pegawai PNS maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan presentase Tujangan Perbaikan Penghasilan Pegawai dihitung berdasarkan jam keterlambatan maupun jam pulang mendahului pegawai. Serta apabila dilakukan terus menerus sehingga jam keterlambatan/jam pulang mendahului melebihi 72 jam maka akan dikenakan sanksi Hukuman Disiplin Berupa Teguran tertulis dan Pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai sebesar 20% serta penundaan masa kerja selama Masa Hukuman Disiplin berlangsung. Untuk pegawai non PNS meskipun masih belum terdapat aturan pasti mengenai sanksi bagi pegawai yang kurang disiplin, namun tetap dilakukan evaluasi oleh BKPSDM Provinsi Bali yakni per tiga bulan terhadap kehadiran pegawai non PNS. Pegawai non PNS harus memiliki persentase kehadiran melebihi 50% agar tidak terkena sanksi. Adapun sanksi yang diterapkan oleh BKPSDM Provinsi Bali yakni berupa pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai non PNS yang ditemukan memiliki persentase kehadiran di bawah 50% selama tiga bulan.

Faktor Penghambat

1. Kualitas Jaringan Internet di BKPSDM Provinsi Bali yang Kurang Stabil

Kualitas jaringan internet yang stabil dapat menunjang kelancaran penggunaan aplikasi online (Face Detector) agar dapat digunakan dengan baik. Namun kualitas jaringan internet di kawasan BKPSDM Provinsi Bali belum cukup stabil sehingga menyebabkan terhambatnya penggunaan aplikasi absensi Face Detector. Terutama saat aplikasi terdapat pembaharuan, buruknya jaringan internet di BKPSDM Provinsi Bali menyebabkan pembaharuan tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya aplikasi tidak dapat diperbaharui serta aplikasi yang macet saat digunakan untuk mengisi absensi.

2. Kemampuan Pegawai yang Belum Merata

Belum seluruh pegawai BKPSDM Provinsi Bali dapat menggunakan absensi online (Face Detector) dengan baik. Terutama bagi pegawai yang telah berusia lanjut dan khususnya bagi pegawai non PNS seperti petugas kebersihan yang masih mengalami kesulitan saat menggunakan metode absensi ini. Hal tersebut dikarenakan pegawai yang belum terbiasa dan kurang memahami teknologi. Terlihat dari persentase kehadiran

pegawai non PNS yang masih jauh berada di bawah persentase absensi pegawai PNS. Jika dibandingkan dengan persentase absensi pegawai PNS, masih sedikit pegawai non PNS yang persentase absensi perbulannya mencapai 100%. Bahkan terdapat pula pegawai non PSN yang persentase absensi bulanannya di bawah 60%.

Rekomendasi

Berikut merupakan rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan absensi online (Face Detector) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, yakni:

1. Penambahan jumlah *WI-FI* sehingga dapat digunakan oleh seluruh pegawai di BKPSDM Provinsi Bali.
2. Pembenahan pada aplikasi *Face Detector* sehingga saat digunakan, aplikasi tidak mengalami *error*.
3. Memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kemampuan pegawai agar dapat melakukan absensi online dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan absensi online (*Face Detector*) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali sudah diwujudkan dengan efektif yakni telah meningkatkan disiplin para pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali meskipun belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Adapun indikator yang telah berjalan optimal yakni indikator pencapaian tujuan dan integrasi. Sementara pada indikator adaptasi belum berjalan dengan optimal baik dari aspek kemampuan pegawai dan sarana prasarana.

Saran

1. Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali diharapkan dapat terus melakukan pengawasan terkait penerapan absensi online (*Face Detector*) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali agar dapat tetap digunakan dengan baik dan lancar oleh seluruh pegawai.
2. Pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dapat segera menetapkan aturan resmi terkait sanksi yang akan diterapkan

kepada pegawai non PNS apabila ditemukan pegawai dengan persentase kehadiran yang masih kurang.

3. Pihak SPBE Diskominfo Provinsi Bali diharapkan dapat meminimalisir biaya produksi aplikasi absensi online (*Face Detector*) melalui pengadaan kompetisi terkait alat pendeteksi wajah sehingga pihak SPBE Diskominfo Provinsi Bali dapat memiliki alat pendeteksi wajah sendiri dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk alat pendeteksi wajah.

DAFTAR REFERENSI

- Databoks.com. 2022. Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-jutapengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> pada 12 Februari 2023.
- Kharisma, D. & T. Yuningsih. (2017). *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang*. *Journal of Public Policy And Management Review*, 770-781.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Parawu, H. E. (2020). *Efektivitas Pemanfaatan Electronic Government Guna Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara*. *Journal Publicuho*, 3 (3), 311-330. Diakses melalui <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index> pada 08 Juli 2023.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Absensi *Face Detector* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- Pratiwi, Kadek Mas Febby; Prabawati, Ni Putu Anik; Purnamaningsih, Putu Eka. (2022). *Efektivitas Program Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri (Aku Dicari) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*. *Citizen Charter*, 2 (1), 63-72. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/88037> pada 08 Juli 2023.
- Septiah, Nabilah., dkk. (2022). *Efektivitas Penggunaan Face Print Dalam Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir*. Rama Repository.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Alfabeta
- Wati, Kadek Sukma., Wijaya, Komang Adi Sastra., Winaya, I Ketut. (2022). *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*. *Citizen Charter*, 2 (1), 127-137. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/88166> pada 08 Juli 2023.